

## MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN: KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIF

Edi Ardhansa<sup>1</sup>, Nasruddin<sup>2</sup>, Muljono Damopolii<sup>3</sup>, Yuspiani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[ediardihansasanneng28@gmail.com](mailto:ediardihansasanneng28@gmail.com)<sup>1</sup>, [nasruddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:nasruddin@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,

[muljono.damopolii@uin-alauddin.ac.id](mailto:muljono.damopolii@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>, [yuspiani@uin-alauddin.ac.id](mailto:yuspiani@uin-alauddin.ac.id)<sup>4</sup>

---

**ABSTRACT;** *Improving the quality of education is a strategic priority in national development that continues to be pursued by the Indonesian government through various comprehensive policy initiatives. This study is a descriptive qualitative research aimed at analyzing educational policies related to quality improvement, identifying supporting and inhibiting factors in their implementation, and examining their impact on educational processes and outcomes at the school level. Using a qualitative approach with a literature review method, this study analyzes policy documents, scientific articles, and relevant research reports. The analysis reveals that policies such as the development of the Merdeka Curriculum, implementation of the National Assessment, enhancement of teacher competencies through digital platforms, application of education zoning, digital transformation of learning, the Indonesia Smart Program (PIP), School Operational Assistance (BOS Afirmasi), and educational decentralization have significantly contributed to improving learning quality and ensuring equitable access to education. However, the implementation of these policies still faces various challenges, including infrastructure disparities, low digital literacy among educators, bureaucratic inefficiencies, and socio-economic inequalities across regions. Therefore, strengthening stakeholder collaboration, enhancing human resource capacity, and establishing data-driven evaluation systems are essential to ensure the effectiveness and sustainability of these policies. This study provides valuable insights for the development of more adaptive, equitable, and responsive educational policies that align with global dynamics and local needs in Indonesia.*

**Keywords:** *Education Policy, Education Quality, Merdeka Curriculum, Digital Transformation, Educational Decentralization, Policy Evaluation.*

**ABSTRAK;** Peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas strategis dalam pembangunan nasional yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai inisiatif kebijakan yang komprehensif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan terkait peningkatan mutu, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta mengkaji dampaknya terhadap proses dan hasil pendidikan di tingkat sekolah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka, penelitian ini

menganalisis dokumen kebijakan, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan seperti pengembangan Kurikulum Merdeka, implementasi Asesmen Nasional, peningkatan kompetensi guru melalui platform digital, penerapan zonasi pendidikan, transformasi digital pembelajaran, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS Afirmasi), dan desentralisasi pendidikan telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan. Namun, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain disparitas infrastruktur, rendahnya literasi digital pendidik, inefisiensi birokrasi, dan ketimpangan sosial ekonomi antarwilayah. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembentukan sistem evaluasi berbasis data sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan-kebijakan tersebut. Studi ini memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif yang selaras dengan dinamika global dan kebutuhan lokal di Indonesia..

**Kata Kunci:** Education Policy, Education Quality, Merdeka Curriculum, Digital Transformation, Educational Decentralization, Policy Evaluation.

## **PENDAHULUAN**

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional yang terus menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan tuntutan zaman, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan pendidikan yang bersifat komprehensif sesuai dengan landasan beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut mencakup reformasi kurikulum, seperti pengembangan Kurikulum Merdeka, pelaksanaan Asesmen Nasional, penguatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi pendidikan, pemberian beasiswa PIP, serta penerapan zonasi pendidikan serta desentralisasi kebijakn sebagai bagian dari strategi pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Mulyani & Insani, 2023).

Kebijakan-kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, tetapi juga memperbaiki proses pembelajaran agar lebih aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Pemerintah mendorong transformasi pendidikan melalui pemberian otonomi lebih luas kepada satuan pendidikan dan guru dalam merancang proses

belajar yang adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Hal ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kreativitas, berpikir kritis, serta kemampuan sosial-emosional yang menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi (Fatmawati & Jaya, 2025).

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan tidak lepas dari tantangan. Di satu sisi, keberhasilan implementasi didukung oleh berbagai faktor seperti komitmen pemangku kepentingan, ketersediaan anggaran, kompetensi tenaga pendidik, fleksibilitas kurikulum, serta dukungan teknologi dan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas kebijakan, seperti ketimpangan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah, birokrasi yang tidak sinkron, serta kesenjangan sosial dan ekonomi peserta didik (Di et al., 2024).

Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Kajian ini juga perlu menggali faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap proses dan hasil pendidikan di satuan pendidikan. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan dan mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih adil, bermutu, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Artikel ini mengangkat tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana kebijakan Pendidikan tentang peningkatan mutu Pendidikan di Indonesia? (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan? dan (3) Dampak kebijakan pendidikan tersebut terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan di satuan pendidikan? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan kebijakan Pendidikan tentang peningkatan mutu Pendidikan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan Analisis kebijakan pendidikan tentang peningkatan mutu pendidikan pengembangan Kurikulum Merdeka, pelaksanaan Asesmen Nasional, penguatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi

pendidikan, pemberian beasiswa PIP, serta penerapan zonasi pendidikan serta desentralisasi kebijakn sebagai bagian dari strategi pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter kajian yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap dokumen-dokumen kebijakan dan regulasi yang mengatur peningkatan mutu pendidikan di Indonesia (Yanti, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dokumen sekunder meliputi artikel-artikel ilmiah, laporan penelitian, serta hasil kajian akademik yang relevan dan terbit di jurnal bereputasi (Wahyudi et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap publikasi online, jurnal ilmiah, serta bahan kebijakan dari situs resmi pemerintah. Seluruh data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber (Lehmann, 2023).

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis yang mendalam dan terstruktur mengenai kebijakan pendidikan tentang kebijakan peningkatan mutu pendidikan, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik kebijakan berbasis data dalam konteks kebijakan peningkatan mutu pendidikan di indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil**

Hasil dari analisis dokumen dan literatur menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tentang peningkatan mutu pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup banyak, namun yang menjadi kebijakn yang memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di negara kita, yaitu: Reformasi kurikulum, seperti pengembangan Kurikulum Merdeka, pelaksanaan Asesmen Nasional, penguatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi pendidikan, pemberian beasiswa PIP, serta penerapan zonasi pendidikan serta desentralisasi kebijakan sebagai bagian dari strategi pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

### **Pengembangan kurikulum merdeka**

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah penyesuaian kurikulum, seperti pengembangan Kurikulum Merdeka yang memberi keleluasaan bagi sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, serta menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal (Arduini, 2020). Kurikulum Merdeka juga memungkinkan guru untuk mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran yang inovatif, sehingga siswa dapat lebih terlibat dan termotivasi dalam proses belajar mengajar (Nursafinah et al., 2024). Peningkatan kompetensi ini sangat penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital, di mana guru diharapkan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang inovatif (Arduini, 2020).

### **Pelaksanaan Asesment Nasional**

Upaya peningkatan mutu juga dilakukan melalui Asesmen Nasional (AN) yang menggantikan Ujian Nasional. AN dirancang untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek kognitif siswa, tetapi juga dari segi iklim belajar dan kualitas proses pembelajaran di sekolah (Zhang & Zhong, 2023).

### **Penguatan Kompetensi guru melalui platform digital**

Penguatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pemanfaatan platform digital dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterlibatan siswa secara signifikan (Mulyadi et al., 2025). Pentingnya penguatan kompetensi guru dalam era digital tidak dapat diabaikan, karena hal ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan relevan bagi siswa (Wahyuni & Haryanti, 2024).

### **Kebijakan Zonasi Pendidikan**

Pemerintah juga menerapkan kebijakan zonasi pendidikan untuk mendekatkan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menciptakan keadilan dalam akses pendidikan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh daerah, terutama di wilayah yang kurang terlayani (Nora, 2022). Kebijakan zonasi ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang

memberikan otonomi kepada daerah untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam perumusan kebijakan pendidikan (Santoso, 2018).

### **Transformasi Digital Pendidikan**

Transformasi digital dalam pendidikan adalah proses integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas pendidikan. Di Indonesia, transformasi digital dipercepat sejak pandemi COVID-19, ketika pembelajaran daring menjadi keharusan. Sejak saat itu, pemerintah meluncurkan berbagai inisiatif digital seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), Rapor Pendidikan, dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPKB). Tujuan dari transformasi ini adalah untuk mendukung guru dalam merancang pembelajaran yang adaptif dan berbasis kebutuhan siswa, serta mendorong satuan pendidikan mengelola data secara lebih akurat dan berbasis bukti. Digitalisasi pendidikan juga memungkinkan perluasan akses belajar bagi siswa di wilayah terpencil melalui platform pembelajaran daring (Musakirawati et al., 2023).

### **Program Indonesia Pintar (PIP) dan BOS Afirmasi**

Kedua program tersebut saling melengkapi dalam kerangka pemerataan layanan pendidikan: PIP menyasar individu siswa untuk memastikan keberlanjutan pendidikan, sementara BOS Afirmasi mendukung infrastruktur dan operasional sekolah di daerah rentan. Studi-studi evaluatif menunjukkan bahwa kolaborasi ini efektif meningkatkan akses dan kualitas, namun tantangan tetap ada dalam hal penyaluran dana, akurasi data penerima, sosialisasi, dan monitoring pelaksanaan (Jumanah & Rosita, 2023). Dengan memperkuat koordinasi antar lembaga dan transparansi sistem, pemerintah berharap PIP dan BOS Afirmasi menjadi pilar utama dalam mencapai pemerataan pendidikan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

### **Desentralisasi pendidikan dan penguatan peran daerah**

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan nasional dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Kebijakan ini didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan pentingnya pelibatan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Dengan desentralisasi, diharapkan kebijakan pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta mendorong inovasi yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat (Sumpena et al., 2022).

## **B. Pembahasan**

Pemerintah memiliki peran sentral dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui berbagai kebijakan strategis yang mencakup aspek kurikulum, pendanaan, pengembangan tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini dirancang agar proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman (Huda et al., 2023). Peningkatan mutu pendidikan juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inovatif.

### **Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan**

#### **Pengembangan Kurikulum Merdeka**

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah penyesuaian kurikulum, seperti pengembangan Kurikulum Merdeka yang memberi keleluasaan bagi sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, serta menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal (Arduini, 2020). Kurikulum Merdeka juga memungkinkan guru untuk mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran yang inovatif, sehingga siswa dapat lebih terlibat dan termotivasi dalam proses belajar mengajar (Nursafinah et al., 2024). Peningkatan kompetensi ini sangat penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital, di mana guru diharapkan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang inovatif (Arduini, 2020).

Struktur Kurikulum Merdeka lebih sederhana dibandingkan kurikulum sebelumnya. Terdapat pengurangan beban mata pelajaran, terutama di jenjang PAUD dan Sekolah Dasar, serta penambahan waktu untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran diintegrasikan untuk menciptakan keterkaitan antartema dan antarbidang ilmu, sehingga siswa lebih mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk membentuk karakter pelajar yang mandiri, bekerja sama, dan berpikir kritis, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan (Fadillah & Yusuf, 2022).

Kurikulum ini juga memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi, yang penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di era modern. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan fleksibilitas kepada pengajar dalam menyusun pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Nursafinah et al., 2024). Kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik dengan memanfaatkan teknologi, sehingga mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan (Sofyan Syamratulangi et al., 2024).

### **Pelaksanaan Asesment Nasional**

Asesmen Nasional terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AKM mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa sebagai fondasi pembelajaran. Survei Karakter mengukur nilai-nilai karakter berdasarkan Profil Pelajar Pancasila, sementara Survei Lingkungan Belajar menilai kualitas lingkungan pembelajaran yang diciptakan oleh satuan pendidikan dan guru. Komponen-komponen ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan dan karakter siswa, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Pentingnya asesmen ini terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengembangkan karakter siswa, sejalan dengan upaya pendidikan karakter dalam kurikulum Merdeka (Sya'ban et al., 2025).

Upaya peningkatan mutu juga dilakukan melalui Asesmen Nasional (AN) yang menggantikan Ujian Nasional. AN dirancang untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek kognitif siswa, tetapi juga dari segi iklim belajar dan kualitas proses pembelajaran di sekolah (Zhang & Zhong, 2023). Program ini

diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah, terutama dalam hal literasi dan numerasi dalam konteks pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, Asesmen Nasional dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih efektif (Plenden, 2023).

### **Penguatan Kompetensi Guru Melalui Platform Digital**

Platform digital memberikan akses luas kepada guru untuk mengembangkan diri kapan saja dan di mana saja. Melalui berbagai situs pembelajaran daring, aplikasi edukatif, dan portal pelatihan resmi, guru dapat mengikuti pelatihan, webinar, dan kursus bersertifikat tanpa harus meninggalkan ruang kelas. Dengan demikian, platform digital menjadi solusi efektif dalam memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan pedagogik, serta memperkuat penguasaan teknologi dan materi ajar. Dengan adanya dukungan teknologi pendidikan, guru dapat lebih mudah beradaptasi dengan metode pembelajaran baru, sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat secara signifikan (Amelia & Solikhah, 2024).

Penguatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pemanfaatan platform digital dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterlibatan siswa secara signifikan (Mulyadi et al., 2025). Pentingnya penguatan kompetensi guru dalam era digital tidak dapat diabaikan, karena hal ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan relevan bagi siswa (Wahyuni & Haryanti, 2024).

Belajar melalui platform digital memberikan berbagai keuntungan, seperti fleksibilitas waktu, akses ke materi terkini, serta keterlibatan dalam komunitas pembelajaran profesional. Selain itu, guru juga dapat belajar secara mandiri dengan kecepatan masing-masing, tanpa tekanan. Evaluasi dan umpan balik yang diberikan dalam platform digital juga membantu guru memahami sejauh mana mereka telah berkembang dan apa yang perlu ditingkatkan. Penggunaan platform digital dalam pembelajaran juga memungkinkan guru untuk mengakses berbagai sumber daya dan alat yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka (Anis et al., 2023).

Pentingnya pelatihan dan dukungan teknis bagi guru dalam penggunaan platform digital tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks pembelajaran daring yang semakin berkembang (Purwanti & Sari, 2022). Melalui pelatihan yang tepat, guru dapat

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa (Febriyanti & Sundari, 2020).

### **Kebijakan Zonasi Pendidikan**

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta mengurangi praktik diskriminasi berdasarkan nilai atau status sosial. Dengan sistem zonasi, siswa diharapkan dapat bersekolah di satuan pendidikan terdekat dari tempat tinggalnya. Namun, pelaksanaan kebijakan ini seringkali menghadapi tantangan, seperti distribusi sekolah yang tidak merata dan kurangnya pemahaman orang tua tentang sistem zonasi (Prestoroika et al., 2022). Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, banyak daerah masih mengalami ketidakmerataan jumlah sekolah dan minimnya sosialisasi yang menyebabkan kebingungan di kalangan orang tua yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan zonasi. (Winarti et al., 2023).

Pemerintah juga menerapkan kebijakan zonasi pendidikan untuk mendekatkan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menciptakan keadilan dalam akses pendidikan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh daerah, terutama di wilayah yang kurang terlayani (Nora, 2022). Kebijakan zonasi ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam perumusan kebijakan pendidikan (Santoso, 2018).

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan memperbaiki distribusi sekolah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam konteks ini, evaluasi terhadap kebijakan zonasi menunjukkan bahwa ketidaksiapan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan sistem tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitasnya (Mirtha Ilmi & Cindy Dwi Maulidiya, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar kebijakan zonasi dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan (Sari & Dewi, 2023).

### **Transformasi Digital Pendidikan**

Transformasi digital dalam pendidikan adalah proses integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas pendidikan. Di Indonesia, transformasi digital dipercepat sejak pandemi COVID-19, ketika pembelajaran daring menjadi keharusan. Sejak saat itu, pemerintah meluncurkan berbagai inisiatif digital seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), Rapor Pendidikan, dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPKB). Tujuan dari transformasi ini adalah untuk mendukung guru dalam merancang pembelajaran yang adaptif dan berbasis kebutuhan siswa, serta mendorong satuan pendidikan mengelola data secara lebih akurat dan berbasis bukti. Digitalisasi pendidikan juga memungkinkan perluasan akses belajar bagi siswa di wilayah terpencil melalui platform pembelajaran daring (Musakirawati et al., 2023).

Namun, transformasi digital tidak hanya tentang penyediaan teknologi, melainkan juga perubahan paradigma dalam proses belajar mengajar. Guru perlu memiliki literasi digital dan keterampilan pedagogi yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Sementara itu, siswa perlu dibekali kemampuan belajar mandiri, literasi media, dan etika digital. Integrasi teknologi secara tepat dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, terutama jika disertai pendekatan pedagogi yang tepat. Kendati demikian, tantangan besar masih dihadapi, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya kompetensi digital guru, dan infrastruktur yang belum merata di daerah 3T. (Triyunita et al., 2025).

Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital pendidikan memerlukan sinergi antara kebijakan nasional, peningkatan kapasitas SDM, dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah perlu memperluas akses TIK di daerah tertinggal, memberikan pelatihan intensif bagi guru, dan memperkuat ekosistem digital pendidikan yang inklusif. Evaluasi berkala terhadap efektivitas platform digital dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa juga sangat penting. Jika dijalankan secara sistemik dan merata, transformasi digital bukan hanya menjawab tantangan masa kini, tetapi juga membekali generasi muda dengan kompetensi yang relevan di era industri 4.0 dan society 5.0 (Nashrullah et al., 2025).

### **Program Indonesia Pintar (PIP) dan BOS Afirmasi**

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin. Sebagai bagian

dari upaya sosial, PIP memberikan kartu bantuan tunai melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan agar siswa tidak putus sekolah hingga jenjang menengah atas (Jumanah & Rosita, 2023). Menurut evaluasi penelitian misalnya studi di SD dan SMP implementasi PIP efektif memperluas akses pendidikan, meski masih dihadapkan pada kendala seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya sosialisasi, dan efisiensi penyaluran yang kurang optimal. Dengan perbaikan mekanisme penyaluran dan munculnya standar teknis melalui Permendikbud No. 10 Tahun 2020, PIP terus dikembangkan sebagai strategi pengurangi angka putus sekolah serta peningkatan mutu pendidikan.

BOS Afirmasi adalah varian dari Dana BOS yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun sekolah dengan proporsi tinggi siswa miskin atau guru tidak tetap. Fungsinya melengkapi kekurangan dana BOS Reguler dan diarahkan agar dana fleksibel, efisien, akuntabel, dan transparan dalam mendukung operasional serta peningkatan layanan mutu sekolah (Nurahmawati et al., 2023). Terutama selama masa pandemi COVID-19, BOS Afirmasi (dan juga BOS Kinerja) diberi relaksasi penggunaan untuk kebutuhan pembelajaran jarak jauh dan dukungan siswa rentan, dengan skema alokasi langsung dari Kementerian ke rekening sekolah sebesar sekitar Rp 60 juta per sekolah per tahun (Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Kedua program tersebut saling melengkapi dalam kerangka pemerataan layanan pendidikan: PIP menyasar individu siswa untuk memastikan keberlanjutan pendidikan, sementara BOS Afirmasi mendukung infrastruktur dan operasional sekolah di daerah rentan. Studi-studi evaluatif menunjukkan bahwa kolaborasi ini efektif meningkatkan akses dan kualitas, namun tantangan tetap ada dalam hal penyaluran dana, akurasi data penerima, sosialisasi, dan monitoring pelaksanaan (Jumanah & Rosita, 2023). Dengan memperkuat koordinasi antar lembaga dan transparansi sistem, pemerintah berharap PIP dan BOS Afirmasi menjadi pilar utama dalam mencapai pemerataan pendidikan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

### **Desentralisasi Pendidikan dan Penguatan Peran Daerah**

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan nasional dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Kebijakan ini didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan pentingnya pelibatan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Dengan desentralisasi, diharapkan kebijakan pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta mendorong inovasi yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat (Sumpena et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya, desentralisasi diperkuat melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu otonomi sekolah dalam mengelola sumber daya, menyusun program, dan membuat keputusan operasional secara mandiri. MBS mendorong keterlibatan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun lingkungan belajar yang efektif dan akuntabel. Meskipun memberikan ruang untuk inovasi lokal, pelaksanaan desentralisasi menghadapi tantangan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kapasitas manajerial (Arain, 2023).

Agar kebijakan ini berjalan efektif, dibutuhkan penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan sistem evaluasi berbasis data. Pemerintah pusat juga perlu memastikan sinergi dan koordinasi lintas level pemerintahan agar tidak terjadi ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah. Jika dijalankan dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, desentralisasi pendidikan dapat menjadi fondasi bagi sistem pendidikan nasional yang lebih adil, partisipatif, dan bermutu (Herawati et al., 2020).

### **Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan**

Dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan, terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilannya (Hazin & Devi Rahmawati, 2023). Faktor-faktor ini saling berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan di tingkat pusat maupun daerah:

#### **Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan:**

##### **1) Komitmen Pemerintah dan Pemangku Kepentingan**

Dukungan kuat dari pemerintah pusat hingga daerah dalam bentuk regulasi, pendanaan, dan pengawasan menjadi fondasi penting. Termasuk di dalamnya adalah dukungan dari kepala sekolah, guru, dan orang tua (KHADIJA, 2022). Kerjasama ini mencakup kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan

pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

2) Ketersediaan Anggaran yang Memadai

Alokasi dana pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD mendorong tersedianya sarana, pelatihan guru, dan program peningkatan kualitas pembelajaran. Keterlibatan aktif semua pihak dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif yang diharapkan dalam peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan memerlukan sinergi antara semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan efektif (Masrianda, 2022).

3) Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terlatih, dan adaptif terhadap Pendidikan yang adaptif memungkinkan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga meningkatkan kemampuan institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang cepat (Iriyadi & Fauzi, 2024). Perubahan kurikulum menjadi penggerak utama dalam implementasi kebijakan.

4) Kurikulum yang Relevan dan Fleksibel

Kurikulum seperti Kurikulum Merdeka memungkinkan satuan pendidikan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan konteks lokal. Kurikulum yang dirancang dengan fleksibilitas ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan relevansi pendidikan, menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pentingnya evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan juga tidak boleh diabaikan, agar dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan yang ada (Arifin et al., 2023).

5) Pemanfaatan Teknologi Pendidikan

Penggunaan platform digital seperti Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar, dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan mendukung transparansi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penggunaan teknologi ini juga memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat, sehingga pengambilan keputusan berbasis bukti menjadi lebih efektif dalam meningkatkan mutu

pendidikan (Almotairi & Elsigini, 2022). Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan tidak dapat diabaikan, karena sinergi ini menjadi kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan.

6) Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Dukungan masyarakat, LSM, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri (misalnya dalam pendidikan vokasi) turut memperkuat ekosistem pendidikan. Kerjasama ini dapat menciptakan peluang yang lebih baik bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang praktis dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pendidikan vokasi dapat membantu menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan kebutuhan pasar kerja (Igbongidi, 2023).

### **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan**

1. Ketimpangan Infrastruktur dan Akses

Masih terdapat ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dalam hal fasilitas pendidikan, akses internet, dan tenaga pengajar. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai daerah, sehingga menghambat peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan program yang dapat mengatasi ketimpangan infrastruktur pendidikan di wilayah 3T (Fadli & Irwansyah, 2022).

2. Rendahnya Kapasitas SDM di Daerah

Banyak guru dan kepala sekolah yang belum sepenuhnya memahami atau mampu mengimplementasikan kebijakan baru karena keterbatasan pelatihan dan pendampingan dan meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari lokasi geografis mereka, dapat menikmati pendidikan berkualitas yang setara. Peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan lokal (Almasri et al., 2023).

3. **Birokrasi yang Lambat dan Tidak Sinkron**  
Koordinasi antara instansi pusat dan daerah kadang tidak berjalan optimal, menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan. Penting untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait agar implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pendidikan, sehingga kebutuhan lokal (Essuman, 2019).
4. **Resistensi terhadap Perubahan**  
Beberapa pihak, seperti guru atau sekolah, menunjukkan sikap pasif atau menolak kebijakan baru karena kurangnya sosialisasi, ketakutan akan evaluasi, atau beban administratif tambahan. Penting untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk mengatasi resistensi ini, sehingga semua pihak dapat beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan dalam kebijakan pendidikan. Pentingnya dukungan teknologi, seperti penyediaan akses internet yang lebih baik, dapat membantu mengurangi ketimpangan pendidikan di daerah 3T dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan (Rasyiidin et al., 2022).
5. **Minimnya Monitoring dan Evaluasi yang Berkualitas**  
Tanpa evaluasi yang konsisten dan berbasis data, kebijakan sulit diukur efektivitasnya dan tidak dapat diperbaiki secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi semua siswa. Implementasi kebijakan pendidikan yang efektif sangat bergantung pada kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan (Berkovich, 2021).
6. **Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Peserta Didik**  
Faktor ekonomi keluarga juga dapat menghambat keterlibatan siswa dalam proses pendidikan yang berkualitas, seperti akses terhadap gawai, internet, atau les tambahan. Kondisi ini memerlukan perhatian dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan program yang dapat mendukung partisipasi siswa dalam

pendidikan yang lebih baik (Fang et al., 2023). Kebijakan yang efektif harus mencakup strategi untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya pendidikan di seluruh wilayah.

### **Dampak kebijakan pendidikan tersebut terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan di satuan pendidikan**

Kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan di satuan pendidikan. Pentingnya kebijakan ini tidak hanya terletak pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih baik di kalangan siswa, terutama dalam konteks pendidikan tinggi (Sabarudin et al., 2024). Dampak tersebut mencakup peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan relevansi kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan relevan (Muallimah et al., 2024). Dampak tersebut dapat diamati dari dua dimensi utama, yaitu:

#### **Dampak terhadap Proses Pendidikan di Satuan Pendidik**

1) Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Penerapan kebijakan seperti Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa, mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Ini memperbaiki pendekatan belajar dari yang sebelumnya berbasis hafalan menjadi lebih eksploratif dan kritis. Penerapan Kurikulum Merdeka juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mereka, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan global saat ini (Sumilat & Geor, 2024).

2) Profesionalisme Guru yang Lebih Baik

Melalui kebijakan pengembangan profesi berkelanjutan dan pemanfaatan platform digital seperti Platform Merdeka Mengajar, guru mendapatkan akses terhadap pelatihan, materi ajar, dan komunitas belajar yang memperkuat kapabilitas mereka dalam mengelola kelas. Peningkatan kualitas pendidikan di

Indonesia sangat bergantung pada kemampuan guru untuk memanfaatkan teknologi dan berbagi praktik baik, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan Platform Merdeka Mengajar (Hidayati et al., 2024).

3) Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Kebijakan desentralisasi dan otonomi sekolah mendorong kepala sekolah dan tim manajemen untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembelajaran, serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Semua pihak dalam proses pendidikan dapat menciptakan sinergi yang kuat, mendorong inovasi, dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap pendidikan di tingkat lokal. Keterlibatan ini juga sejalan dengan pentingnya kepercayaan dalam organisasi, yang dapat mendorong perilaku berbagi pengetahuan di antara semua pihak yang terlibat (Fadhilah & Damarwulan, 2024). Kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses pendidikan, sehingga mempersiapkan siswa menjadi individu yang mandiri dan berdaya saing di era global.

4) Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Belajar Mengajar

Pemerintah mendorong digitalisasi sekolah melalui berbagai kebijakan transformasi digital. Ini mempermudah akses terhadap materi pembelajaran, asesmen, serta komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Digitalisasi pendidikan juga memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang relevan, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini (Luluwatun Nazla et al., 2023). Dengan memanfaatkan teknologi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa..

### **Dampak terhadap Hasil Pendidikan di Satuan Pendidikan**

1. Peningkatan Kompetensi Siswa Secara Holistik

Dengan pendekatan asesmen yang lebih menyeluruh seperti Asesmen Nasional, kualitas hasil belajar tidak hanya diukur dari aspek kognitif, tetapi juga dari

karakter dan literasi numerasi. Hal ini mendorong satuan pendidikan untuk menumbuhkan kompetensi sosial-emosional siswa. Kompetensi sosial-emosional yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan murid dan keberhasilan akademik mereka, terutama dalam konteks pembelajaran yang lebih holistik (Radin Abdul Halim et al., 2020).

2. Peningkatan Kesetaraan Pendidikan

Kebijakan seperti zonasi pendidikan, BOS Afirmasi, dan program Indonesia Pintar (PIP) berkontribusi terhadap pemerataan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan di daerah kurang berkembang pun berkesempatan untuk meningkatkan kualitasnya. Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa di daerah kurang berkembang, sehingga dapat meningkatkan kesetaraan pendidikan di seluruh Indonesia (Juwita Sari et al., 2024).

3. Perbaikan Kinerja dan Akuntabilitas Sekolah

Sistem pelaporan berbasis data (seperti Rapor Pendidikan) memungkinkan satuan pendidikan melakukan evaluasi diri secara lebih objektif dan berkelanjutan. Ini berdampak pada perbaikan mutu secara terarah dan terukur. Sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan (Schildkamp et al., 2019).

4. Tingkat Partisipasi dan Kepuasan Meningkat

Implementasi kebijakan yang melibatkan peran masyarakat, guru, dan siswa secara lebih aktif berdampak pada peningkatan rasa memiliki terhadap proses pendidikan. Akibatnya, terjadi peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar dan peningkatan kepuasan terhadap layanan pendidik. Pendidikan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan responsif, sehingga meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Pendidikan yang inklusif dan partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga mendukung perkembangan

### **Refleksi dan Implikasi Kebijakan**

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menghadapi tantangan global dan ketimpangan pendidikan di berbagai daerah. Dalam perjalanan implementasinya, kita dapat melihat bahwa pendidikan tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga dukungan konkret di tingkat pelaksana. Refleksi penting dari berbagai kebijakan ini adalah bahwa reformasi pendidikan tidak cukup hanya bersifat top-down, melainkan harus dibarengi dengan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan seperti Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, dan transformasi digital pendidikan telah memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk lebih adaptif dan kreatif. Namun, tantangan di lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan kesiapan SDM, menunjukkan bahwa kebijakan yang baik pun tidak akan berhasil tanpa dukungan sistem yang kuat dan eksekusi yang konsisten.

Implikasi dari kebijakan-kebijakan tersebut sangat luas terhadap sistem pendidikan nasional. Pertama, sekolah dan guru harus mampu menyesuaikan diri dengan pendekatan kurikulum yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang menuntut peningkatan kapasitas profesional secara berkelanjutan. Kedua, pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan di wilayahnya, sejalan dengan semangat desentralisasi. Ketiga, penggunaan teknologi dalam pendidikan menuntut adanya literasi digital yang tinggi baik bagi guru maupun siswa, serta dukungan infrastruktur digital yang merata. Di sisi lain, kebijakan afirmatif seperti PIP dan BOS Afirmasi berimplikasi pada perlunya penguatan sistem data penerima manfaat agar tepat sasaran, akuntabel, dan mampu menjawab ketimpangan pendidikan secara berkeadilan. Secara keseluruhan, keberhasilan peningkatan mutu pendidikan memerlukan kerja kolaboratif, kebijakan yang adaptif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan inklusif.

### **KESIMPULAN**

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, seperti pengembangan Kurikulum Merdeka, pelaksanaan Asesmen Nasional, penguatan kompetensi guru melalui platform digital, serta digitalisasi sistem pendidikan. Selain itu, kebijakan afirmatif seperti zonasi pendidikan, Program

Indonesia Pintar (PIP), dan BOS Afirmasi terbukti mampu mendukung pemerataan akses pendidikan terutama di wilayah tertinggal. Pendekatan desentralisasi dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) juga memberikan ruang bagi inovasi lokal dalam merespons kebutuhan pendidikan masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran, kompetensi siswa, dan akuntabilitas satuan pendidikan, meskipun masih terdapat tantangan implementasi di lapangan, seperti ketimpangan infrastruktur, kapasitas SDM, serta lemahnya monitoring dan evaluasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Almasri, A., Imamora, M., Demina, D., & Khairat, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Bukittinggi. *Islamika*, 5(3), 954–966. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3450>
- Almotairi, K. H., & Elsigini, W. T. (2022). Effectiveness of instructional digital platforms in the light of employing simulation models to develop learners' cognitive achievement. In *International Journal of Advanced and Applied Sciences* (Vol. 9, Issue 5, pp. 146–155). <https://doi.org/10.21833/ijaas.2022.05.018>
- Amelia, A., & Solikhah, M. (2024). Meningkatkan Kreativitas Menulis Siswa Melalui Penerapan Teknologi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i1.2663>
- Anis, M., Rahman, A., Setyoko, S., & Prasetyo, O. (2023). Pelatihan Media Digital Berbasis Online Platform Bagi Guru di SMA Negeri 3 Kejuruan Muda. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(2), 150–156. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v13i2.2761>
- Arain, A. (2023). Decentralization in Education System: Outcomes and Challenges. *Journal of Development and Social Sciences*, 4(1). [https://doi.org/10.47205/jdss.2023\(4-i\)25](https://doi.org/10.47205/jdss.2023(4-i)25)
- Arduini, G. (2020). Curriculum innovation with Universal Design for Learning. In *Education Sciences and Society* (Issue 1). Education Sciences & Society-Open Access. <https://doi.org/10.3280/ess1-2020oa9460>
- Arifin, N., Jihan, J., Edy Nurtamam, M., Cendrawati Ramli, A., Wonmaly, W., & Pabisangan Tahirs, J. (2023). Strategi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Individual Differences Pada Perguruan Tinggi. *Journal on Education*, 6(1), 3500–3511. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3420>

- Berkovich, I. (2021). The Policy Process: Implementation of Education Policy. In *Education Policy, Theories, and Trends in the 21st Century: International and Israeli Perspectives* (pp. 41–64). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-63103-1\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-63103-1_3)
- Di, P., Membangun, P., Dan, A., Di, K., Ketimpangan, T., & Di, S. (2024). *JURNAL ILMIAH TECHNOSCIENCE POLITEKNIK PGRI BANTEN NOVEMBER 2024 PENDIDIKAN DI PERSIMPANGAN : MEMBANGUN AKSES*. December.
- Essuman, A. (2019). Improving education delivery through community – school partnership: Is the “social contract” being weakened? – A study of two rural schools. *International Journal of Educational Management*, 33(6), 1336–1351. <https://doi.org/10.1108/IJEM-06-2018-0175>
- Fadhilah, A. R. N., & Damarwulan, L. M. (2024). Kepercayaan terhadap Organisasi Mempengaruhi Berbagai Pengetahuan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 1(4), 1–7. <https://doi.org/10.47134/jampk.v1i4.356>
- Fadillah, C. N., & Yusuf, H. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 8(2), 120. <https://doi.org/10.24114/jbrue.v8i2.41596>
- Fadli, M., & Irwansyah, I. (2022). Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Komunikasi Nirkabel di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 279–292. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v6i2.10425>
- Fang, X., Luo, Y., & Qian, Y. (2023). The Impact of Family Economic Situation and Parents’ Educational Expectations on Academic Performance of Junior High School Students. In *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* (Vol. 6, Issue 1, pp. 379–386). <https://doi.org/10.54254/2753-7048/6/20220370>
- Fatmawati, T., & Jaya, A. (2025). *Transformasi Pendidikan Dasar melalui Kurikulum Merdeka : Analisis Dampak pada Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa*. 7, 14–30. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v7i1.811>
- Febriyanti, R. H., & Sundari, H. (2020). Penerapan Penggunaan Platform Dalam Pengajaran Bahasa Inggris Berbasis Daring. *RANGKIANG: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 17–27. <https://doi.org/10.22202/rangkiang.2020.v2i1.4148>

- Hazin, M., & Devi Rahmawati, N. W. (2023). Implementation of Policy “Praktisi Mengajar” in Higher Education. *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.51178/jetl.v5i1.1001>
- Herawati, E. S. B., Suryadi, & Sujanto, B. (2020). *Model Penguatan Implementasi Kebijakan Dewan Pendidikan* (Issue April).
- Hidayati, K., Tamrin, A. G., & Cahyono, B. T. (2024). Efektivitas Penggunaan Platform Merdeka Mengajar untuk Peningkatan Kompetensi Guru pada Kurikulum Merdeka. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 232–240. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.5765>
- Huda, S., Sugandi, Y. S., & Sumadinata, W. S. (2023). Inovasi Kebijakan Pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 519–528. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2526>
- Igbongidi, P. B. (2023). Promoting Partnership between Universities and Industries in Business Education Programme. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VII(V), 451–456. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2023.70537>
- Iriyadi, D., & Fauzi, A. (2024). Adaptifitas Kepegawaian: Tinjauan Literatur terhadap Pengembangan Institusi Pendidikan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1487–1494. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.665>
- Jumanah, J., & Rosita, H. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 52–66. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.99>
- Juwita Sari, Sri Wulandari, Yollanda Putry, & Wiwin Handoko. (2024). Klasifikasi Kelayakan Penerima Program Indonesia Pintar Siswa MIS NU Dusun III Pinangripan. *Journal of Computers and Digital Business*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.56427/jcbd.v3i1.239>
- KHADIJA, H. (2022). STAKEHOLDERS IN EDUCATION. *Annals of the University of Oradea, Economic Science Series*, 5450(July), 41–45. [https://doi.org/10.47535/1991auoes31\(1\)040](https://doi.org/10.47535/1991auoes31(1)040)
- Lehmann, W. (2023). Data and Methodology. In *Choosing to Labour?* (pp. 181–193). <https://doi.org/10.1515/9780773575608-011>

- Luluwaton Nazla, Rina Sama Iyah Agustina, Siti Nurul Hanapiah, Silva Nuraini, & Lina Marlina. (2023). Transformasi Era Digital: Peluang Menggali Pekerjaan Dan Tantangan Terhadap Meningkatnya Pengangguran. *Journal of Economics and Business*, 1(2), 63–73. <https://doi.org/10.61994/econis.v1i2.149>
- Masrianda, M. (2022). Konsep Dasar Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan Dalam Pengelolaan Serta Pengalokasian Dana Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 19(2), 193–202. <https://doi.org/10.17509/jap.v29i2.46826>
- Mirtha Ilmi, & Cindy Dwi Maulidiya. (2024). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Smp Di Kota Surabaya. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5). <https://doi.org/10.62281/v2i5.306>
- Muallimah, S., Andini, L. A., Sanadi, Y. K. C., Siregar, E. P., & Yunita, S. (2024). Mengembangkan Kurikulum yang Lebih Kontekstual dan Relevan Dengan Perkembangan Zaman. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(2), 982–989. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i2.2397>
- Mulyadi, D., Amelia, D., Rusman, R., Fathoni, T., Rienovita, E., Shafarwati, D. A., & Susanti, L. (2025). Pelatihan Peningkatan Kompetensi Digital Guru di Daerah Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Optimalisasi Penggunaan Platform Merdeka Mengajar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 37–51. <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega/article/view/2919>
- Mulyani, H., & Insani, M. N. (2023). Kompetensi Guru Sekolah Penggerak Dalam Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka. *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.54124/jlmp.v20i1.95>
- Musakirawati, M., Jemmy, J., Anggriawan, F., Triansyah, F. A., Akib, A., & Tahir, A. (2023). Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan Indonesia Terhadap Perencanaan Berbasis Data. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 7(2), 201–208. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v7n2.p201-208>
- Nashrullah, M., Rahman, S., Majid, A., Hariyati, N., & Surabaya, U. N. (2025). *TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENDIDIKAN INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS*. 7.
- Nora, D. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. *Jurnal Ecogen*, 5(3), 498. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i3.12904>

- Nurahmawati, N., Umar, U., & Subari, S. (2023). Inovasi Kepala Sekolah pada Pemanfaatan Dana BOS. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 4(3), 156–163. <https://doi.org/10.54371/ainj.v4i3.303>
- Nursafinah, S., Aisah, S., & Pricilia, H. (2024). Peran kurikulum merdeka untuk memajukan kualitas pembelajaran di sekolah. *Karimah Tauhid*, 3(8), 9050–9059.
- Pendidikan dan Kebudayaan, K. (2020). *Penyesuaian BOS dan Relaksasinya Selama Pandemi*.
- Plenden, D. (2023). Evaluasi Kebijakan Asesmen Nasional Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Magelang. *Cakrawala: Jurnal Pendidikan*, 17(2), 23–36. [https://repository.uksw.edu/handle/123456789/30353%0Ahttps://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/30353/32/T2\\_942021002\\_Lampiran.pdf](https://repository.uksw.edu/handle/123456789/30353%0Ahttps://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/30353/32/T2_942021002_Lampiran.pdf)
- Prestoroika, E., Siallagan, D. Y., & Sasongko, A. E. T. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Pontianak. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 5(3), 211. <https://doi.org/10.31764/pendekar.v5i3.10656>
- Purwanti, E., & Sari, M. I. (2022). Pemberdayaan Guru Dalam Pembelajaran Daring Menggunakan Standardized Platform. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.18196/ppm.41.871>
- Radin Abdul Halim, R. M. I., Mohammad Yasin, R., & Nik Yusoff, N. M. R. (2020). Kompetensi Sosial dan Emosional (KSE) Untuk Pengajaran Matematik Sekolah Menengah di Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 5(4), 41–55. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i4.389>
- Rasyiidin, M. Y. B., Hermawan, I., Kurniawan, A., Murad, F. A., Agustin, M., & Arnaldy, D. (2022). Akses Internet Gratis untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menggunakan Teknologi Wireless Manajemen Channel. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 211. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i1.4868>
- Sabarudin, A. P., Lestari, S. I., Adhetia, P. A., & Maulana, N. A. (2024). Pengaruh Lingkungan Pendidikan Tinggi Terhadap Keterampilan Komunikasi Remaja. *Karimah Tauhid*, 3(1), 739–752. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11689>

- Santoso, B. (2018). Menata Kebijakan Publik Yang Tepat Agar Tidak Terjadi Gejolak Di Masyarakat Bila Diundangkan. *Jurnal Pemerintahan*, 13(1), 36–53. <https://doi.org/10.55745/jpstipan.v13i1.91>
- Sari, N., & Dewi, R. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *Journal of Social and Policy Issues*, 3(8), 50–56. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.161>
- Schildkamp, K., Poortman, C. L., & Sahlberg, P. (2019). Data-based decision making in developing countries: balancing accountability measures and improvement efforts. *Journal of Professional Capital and Community*, 4(3), 166–171. <https://doi.org/10.1108/JPCC-07-2019-037>
- Sofyan Syamratulangi, Kamaluddin, & Nurlailah. (2024). Kurikulum Merdeka dari Perspektif Aliran Filsafat Pendidikan dan Filosofi Ki Hadjar Dewantara. In *Jurnal LENTERA: Jurnal Studi Pendidikan* (Vol. 6, Issue 1, pp. 59–70). <https://doi.org/10.51518/lentera.v6i1.177>
- Sumilat, J. M., & Geor, G. (2024). Pendidikan Berbasis Kurikulum Merdeka di Tingkat Sekolah Dasar Menggali Potensi Anak untuk Masa Depan yang Lebih Unggul. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(7), 3636–3648. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i7.16382>
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>
- Sya'ban, B. M., Syahidin, S., Aulia, M. H., Nazhan, F. A., Muzaki, R. F. S., Ali, M. M. F., & Julianto, A. (2025). Optimalisasi Pembelajaran Akidah melalui Model Sosiodrama dalam Memperkuat Karakter Kejujuran Siswa Kelas VIII SMPN 1 Bandung. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(1), 135–149.
- Triyunita, H., Yana, N., & Bachtiar, M. H. (2025). *Transformasi Digital terhadap Kompetensi Guru dalam Pendidikan*. 8(April), 4364–4368.
- Wahyudi, W., Misbah, M., Nurhayati, N., Ngandoh, S. T., & Yustiana, Y. R. (2022). Peluang Muatan Lokal Dalam Pembelajaran Ipa Dalam Perspektif Ruu Sisdiknas. *Vidya Karya*, 37(1), 33. <https://doi.org/10.20527/jvk.v37i1.13175>

- Wahyuni, S., & Haryanti, N. (2024). Optimalisasi Kompetensi Guru Dalam Pengembangan Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Media Digital. *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan*, 7(1), 142–154. <https://doi.org/10.31851/dedikasi.v7i1.15974>
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210–225. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3579>
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Zhang, X., & Zhong, D. (2023). Self-Evaluation Mechanism of Primary and Secondary School Based on Education Quality Improvement. *Research and Advances in Education*, 2(2), 82–85. <https://doi.org/10.56397/rae.2023.02.10>